

**NAMA MEDIA** : Fokus Jateng  
**TANGGAL** : 04 Januari 2024  
**KATEGORI** : Hukum Agraria

# Kejati

## Selidiki Kasus Tanah Desa

YOGYAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terus melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi tanah kas desa.

Saat ini kejaksaan tengah menyelidiki laporan terkait dugaan penyalahgunaan tanah kas di Kalurahan Wedomartani, Kapane-won Ngemplak, dan Kalurahan Tegaltirto, Berbah.

"Ada dua kasus tanah kas desa yang sedang diselidiki yakni di Wedomartani dan Tegaltirto. Untuk perkara di Wedomartani, bulan ini kami akan menentukan sikap apakah dinaikkan ke penyidikan atau tidak," kata Asisten Pidana Khusus Kejati DIY Muhammad

Anshar Wahyuddin saat Refleksi Kinerja Tahun 2023, Selasa (2/1).

Sepanjang tahun lalu, Kejati DIY telah menangani perkara tanah kas desa di tiga lokasi yaitu Kalurahan Caturtunggal, Maguwoharjo, dan Candibinangun. Untuk perkara di Caturtunggal ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga diantaranya sudah menjalani persidangan yakni Agus Santoso (mantan Lurah Caturtunggal), Robinson Saalino (Direktur PT Deztama Putri Sentosa), dan

Krido Suprayitno (mantan Kepala Dispertaru DIY). Sementara 1 orang tersangka lainnya, Andi Sofyan yang sebelumnya menjabat Jogoboyo Kalurahan Caturtunggal, masih dalam proses penyidikan.

Terkait perkembangan kasus di Maguwoharjo, Anshar menjelaskan saat ini masih dilakukan pemberkasan terhadap mantan lurah, Kasidi. "Penyusunan berkas ditargetkan selesai bulan ini," ujarnya.

Adapun penyidikan kasus dugaan korupsi tanah kas desa Candibinangun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka. Kepala Kejati DIY Ponco Hartanto mengatakan, dari penanganan kasus tanah kas desa, pihaknya telah berhasil

menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 4,7 miliar. "Luasan tanah kas desa yang telah diputuskan perkaranya oleh pengadilan kurang lebih 16.000 meter persegi," jelasnya.

Locus perkara dugaan korupsi tanah kas desa yang ditangani Kejati DIY tersebut seluruhnya berada di Kabupaten Sleman. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan akan menasar wilayah lainnya.

"Pemeriksaan kasus tanah kas desa ini didasarkan pada LHP Inspektorat yang disampaikan oleh gubernur. Tapi silakan masyarakat menginformasikan kepada kami jika ada temuan," kata Ponco. (J1-60)